

Ikhtisar Seminar Nasional
Modernisasi TNI
di Bawah Jokowi:
Profesional atau Politis?



Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?

8 Oktober 2024 | 09.00 – 11.00 WIB

Sesi pertama dari Seminar Nasional ini dibuka dengan *Keynote Speech* yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45). Kemudian, seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu: (1) Diyauddin, Analis Utama Maha Data LAB 45; (2) C. Guntur Lebang, Analis Utama Politik Keamanan LAB 45; dan (3) Reine Prihandoko, Analis Utama Politik Keamanan LAB 45; serta dimoderatori oleh Aiman Witjaksono, Pemimpin Redaksi iNews.

Open-source intelligence dan Media Monitoring

Diyauddin menyampaikan bagaimana Open Source Intelligence (OSINT) merupakan metode untuk menganalisis informasi dari sumber terbuka. Metode ini menjadi alat penting di era di mana informasi berlimpah, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih akurat mengenai isu-isu yang mengemuka. Tidak terkecuali dalam analisis data politik di Indonesia, OSINT memiliki peran krusial.

Dari tahun 2009 hingga saat ini, terdapat peningkatan signifikan dalam proporsi konten politik yang dibagikan di media sosial. Momen-momen tertentu, terutama menjelang pemilihan umum (Pemilu), menunjukkan ketertarikan yang tinggi dari masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik. Platform media sosial digunakan oleh para pemimpin dunia, seperti Barack Obama hingga Joko Widodo (Jokowi). Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi platform yang telah aktif digunakan sebagai sarana menyampaikan pandangan politik, sementara TikTok muncul sebagai alat kampanye yang efektif sejak digunakan dalam kampanye Ferdinand “Bongbong” Marcos di Filipina dan Prabowo Subianto di Indonesia.

Berangkat dari lini masa peristiwa politik, dapat dipetakan ujaran ceroboh atau *blunder* dari para pejabat pemerintah maupun tokoh elite politik yang cukup beragam. Sebagai contoh, sejumlah *blunder* dari menteri pada tahun 2020, terutama yang terkait penanganan COVID-19, terbukti menimbulkan kehebohan yang cukup signifikan di media sosial. Pada tahun-tahun berikutnya kegaduhan juga muncul dari komentar kontroversial beberapa tokoh seperti Yaqut Cholil Qoumas yang mengklaim bahwa posisi Menteri Agama adalah jatah milik Nahdlatul Ulama (NU), Budi Arie selaku Menteri Komunikasi dan Informasi menyatakan ingin memungut pajak dari judi *online*, hingga persoalan akun “fufufafa” milik Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wakil presiden terpilih. Kegaduhan-kegaduhan di media sosial tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana komunikasi publik dapat terganggu oleh pernyataan yang tidak tepat.

Selanjutnya, analisis mengenai sentimen publik terhadap isu-isu politik menunjukkan bahwa polemik perpanjangan masa jabatan presiden dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia

pemilih mendapatkan respons yang sangat negatif dari masyarakat. Penggunaan *buzzer* untuk memanipulasi opini memang banyak digunakan seperti yang terlihat dari kluster kecil jejaring media sosial dari PSI yang mendoakan usia jabatan Presiden untuk di saikan. Meski demikian, banyak isu yang juga muncul secara organik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Perdebatan atas revisi undang-undang (UU) TNI dan Polri juga menonjol dalam diskusi ini. Masyarakat menunjukkan keprihatinan terhadap potensi hilangnya kontrol sipil atas TNI, meskipun tingkat kepercayaan terhadap organisasi ini masih relatif tinggi. Ketakutan akan kembalinya otoritarianisme seperti era Orde Baru menjadi sorotan, dan tantangan komunikasi yang dihadapi pemerintah dalam menjelaskan kebijakan kepada publik semakin terasa.

Tidak kalah penting, kebutuhan atas juru bicara kepresidenan yang efektif dan jelas dalam mengelola komunikasi publik perlu ditekankan. Sejak Fadjoel Rachman menjadi Duta Besar di Kazakhstan pada tahun 2021, hilangnya komunikasi yang terarah telah menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Terlebih lagi, kehadiran staf khusus milenial mulanya diharapkan akan mengemban tugas komunikasi yang baik. Namun, nyatanya tidak ada bukti atau perubahan konkret dari kerja mereka, sehingga masih diperlukan upaya memperbaiki saluran komunikasi antara pemerintah dan publik agar lebih efektif dan responsif.

Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?

Sehubungan dengan kegaduhan seputar wacana revisi UU TNI dan Polri, Guntur Lebang dan Reine Prihandoko melanjutkan pembahasan dengan mengulas proses modernisasi dan pengembangan TNI di era Pemerintahan Jokowi. Meskipun banyak aspek yang dapat dikaji untuk menilai modernisasi selama sepuluh tahun terakhir, penilaian yang dilakukan memiliki fokus pada tiga variabel, yakni (1) modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), (2) tata kelola organisasi, dan (3) hubungan sipil-militer.

Guntur Lebang memulai analisis modernisasi alutsista dengan menyoroti tren anggaran pertahanan selama sepuluh tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tren menunjukkan bahwa pada era Jokowi tidak ada peningkatan signifikan dalam nominal anggaran. Alokasi anggaran pertahanan bukan prioritas utama jika dibandingkan sektor lain, seperti ekonomi dan bantuan sosial. Apabila mengacu pada perencanaan Minimum Essential Force (MEF), anggaran pertahanan seharusnya meningkat secara bertahap hingga 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Akan tetapi, realitasnya Indonesia hanya mampu mengalokasikan sekitar 0,8-0,9% dari PDB-nya selama pemerintahan Jokowi. Kegagalan ini dapat dihubungkan dengan tidak tercapainya sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi 7%. Parahnya lagi, lebih dari 50% anggaran pertahanan dialokasikan untuk kebutuhan dukungan manajemen operasional, termasuk untuk gaji prajurit. Sementara itu, kurang 30% dari anggaran pertahanan yang

digunakan untuk modernisasi alutsista yang tidak hanya untuk pengadaan baru, melainkan termasuk untuk perawatan. Permasalahan anggaran pertahanan berdampak pada tidak tercapainya target MEF dari Renstra I-III, terutama pada Renstra III (2020-2024) yang seharusnya sudah 100%. Kementerian Pertahanan bahkan sekitar tahun 2021 sudah tidak lagi menjadikan MEF sebagai acuan modernisasi meski tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Di tengah keterbatasan anggaran pertahanan yang dialokasikan untuk modernisasi alutsista, Reine Prihandoko menunjukkan bagaimana upaya dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan perawatan alutsista tidak bisa membuat angka kecelakaan menurun. Dari periode pertama Jokowi hingga akhir masa jabatannya, angka kecelakaan masih dinilai tinggi. Dengan demikian, era Pemerintahan Jokowi gagal menjalankan Zero-Tolerance Policy. Faktor usia mesin alutsista tidak menjadi faktor tunggal dan utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan alutsista, masih banyak faktor pendukung kecelakaan seperti dari manajemen, manusia, dan medium hingga bahkan kombinasi-kombinasi dari kelima faktor tersebut.

Di samping politik anggaran atau *domestic decision making process*-nya, modernisasi alutsista juga dapat dianalisis berdasarkan *balance of power* dari struktur regional. Apabila dilihat, pengadaan alutsista Indonesia selama periode Jokowi cukup serupa dengan negara-negara sekitar. Indonesia bahkan mampu melakukan pengadaan senjata melalui skema dalam negeri. Sayangnya, mayoritas pengadaan Indonesia baru berstatus tanda tangan kontrak dan belum berupa barang yang bisa digunakan.

Melanjutkan dari permasalahan anggaran dan pengadaan dalam konteks modernisasi alutsista, variabel tata kelola organisasi juga menunjukkan bagaimana TNI belum sepenuhnya mempersiapkan diri sebagai tentara profesional. Reine Prihandoko menyoroti bahwa salah satu hambatan yang dihadapi pemerintahan Jokowi adalah penumpukan perwira (*logjam*) akibat kuantitas penerimaan perwira Akademi Militer Angkatan 1988. Permasalahan ini menjadi “bom waktu” yang mau tidak mau harus dihadapi dalam proses mutasi dan promosi di tubuh TNI, terutama sejak penghapusan kekarayaan. Pembentukan sejumlah satuan baru, terutama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan), yang ditujukan untuk mendorong profesionalitas TNI melalui penguatan kemampuan operasi gabungan tiga matra nyatanya juga telah dimanfaatkan Jokowi sebagai solusi dalam menghadapi hambatan sirkulasi jabatan perwira. Solusi lain seharusnya bisa melalui mekanisme pensiun dini dan pengurangan jumlah rekrutmen. Namun, pilihan kebijakan tersebut tidak digarap secara serius dan bahkan cenderung mendorong perwira militer *non-job* untuk mengisi jabatan sipil di kementerian ataupun lembaga negara lainnya sebagaimana yang menjadi gaduh dalam wacana revisi UU TNI. Selain itu, pola mutasi perwira di era Jokowi juga menarik dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Berbeda dengan era Suharto yang mengisi mayoritas posisi strategis dengan perwira tinggi dengan rekam jejak yang teruji pada berbagai operasi militer dan era SBY yang mengutamakan lulusan terbaik (Adhimakayasa), era Jokowi

menunjukkan pola yang diduga berdasarkan kedekatan dengan Presiden atau “Ring 0”. Kedekatan ini merujuk pada posisi-posisi yang melekat dengan Presiden seperti Ajudan TNI, Sekretariat Militer Presiden Republik Indonesia (Sesmilpres), maupun pemimpin teritorial yang bersinggungan dengan ruang gerak Jokowi dan keluarganya, seperti Solo, Bogor, Jakarta hingga Medan.

Dari pola mutasi perwira selama era Jokowi, penarikan militer ke pusaran kepentingan politik presiden dapat diamati. Jokowi dan pemerintahannya terlihat mencoba menarik TNI untuk mendukung kepentingan pembangunan ekonomi, sehingga mencederai semangat profesionalisme TNI yang menjadi mandat reformasi. Guntur Lebang melanjutkan bagaimana hubungan sipil-militer dalam konteks pengisian jabatan sipil oleh perwira TNI di level kabinet telah diatur sehingga hanya terjadi berdasarkan permintaan dari pimpinan lembaga. Namun, pengaturan tersebut dalam praktiknya dijadikan “kuota” di kementerian atau lembaga sipil agar perwira aktif TNI bisa turut mengisi jabatan yang bahkan dianggap bermasalah dan keluar dari peraturan Pasal 47 UU TNI. Lebih dari itu, DPR seharusnya menjadi mitra kerja yang setara dengan TNI dan melakukan pengawasan dengan efektif untuk mewujudkan hubungan sipil-militer yang ideal. Namun, fungsi pengawasan anggaran yang hanya di level makro maupun fungsi legislasi dari Komisi I tidak maksimal. Perbaikan regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, terutama untuk regulasi-regulasi yang sudah dianggap ‘kedaluwarsa’ seperti UU TNI, UU Pertahanan Negara, hingga UU Peradilan Militer, serta utang regulasi yang belum juga ditekan seperti UU Keamanan Nasional.

Berkaca dari berbagai permasalahan di era Jokowi, terdapat sejumlah rekomendasi bagi pemerintahan Prabowo ke depan. Untuk memperkuat pertahanan negara, perlu dilakukan peningkatan anggaran yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Upaya ini harus didukung dengan perencanaan modernisasi jangka panjang serupa MEF, tetapi harus dipastikan konsistensi pelaksanaannya. Selain itu, pengisian posisi strategis di TNI harus berbasis pada kompetensi dan jalur karier yang profesional, menghindari faktor kedekatan personal sebagai satu-satunya pertimbangan. Penempatan perwira TNI di jabatan sipil harus dilakukan dengan hati-hati, bukan secara sporadis. Diperlukan juga komitmen dan kemauan pemerintah (*political will*) untuk menyelesaikan kebutuhan regulasi-regulasi di sektor pertahanan. Pada akhirnya, upaya-upaya tersebut harus diiringi dengan semangat reformasi yang kuat, tanpa mendorong TNI ke dalam isu-isu non pertahanan.

Sesi Tanya-Jawab

Pertanyaan: Mengapa tidak ada tingkat profesional yang jelas dalam proses pengisian jabatan sipil oleh TNI? Apakah tidak sebaiknya malah perwira yang berkualitas yang ditempatkan di sektor sipil agar dapat memberikan pembelajaran yang sekaligus menjadi kebanggaan?

Jawaban: Penempatan perwira militer ke jabatan sipil sering menjadi solusi cepat dari pemerintah untuk menyalurkan perwira tinggi yang terhambat *logjam*. Ditekankan bahwa akar masalahnya tetap adalah pada tata kelola organisasi agar isu perwira *non-job* bisa diatasi. Biasanya, perwira dengan rekam jejak karier yang cemerlang justru mayoritasnya tidak akan mau untuk pindah ke jabatan sipil karena ingin tetap berkarier dalam satuannya. Oleh karena itu, masalah ini masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor militer.

Pertanyaan: Bagaimana inovasi yang baik untuk sumber daya manusia (SDM) agar menciptakan kultur untuk isu keamanan siber di tubuh TNI?

Jawaban: Permasalahan terkait SDM, terutama untuk isu siber, sebenarnya menjadi masalah di banyak negara dan tidak hanya di Indonesia. Dengan alasan yang berbeda, di negara seperti Amerika Serikat, perwira yang memiliki kecakapan siber memilih pindah ke sektor swasta. Untuk konteks Indonesia, perubahan besar dalam sektor siber memerlukan peristiwa besar, seperti serangan Bjorka yang kemudian direspons dengan lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi. Lalu, isu siber cenderung bersifat *top-down*, sehingga diperlukan kepedulian yang lebih besar dari pengambil kebijakan di level tertinggi untuk isu ini.

Pertanyaan: Bagaimana dinamika terkait pembangunan kekuatan pertahanan di era damai?

Jawaban: Beberapa prediksi skenario menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan terlibat peperangan terbuka, tetapi ancaman utamanya adalah dampak (*spillover*) konflik negara besar di kawasan. Dalam skenario konflik, seperti perang di Taiwan, perlu dipertanyakan apakah Indonesia telah memiliki strategi dan kemampuan untuk melakukan evakuasi lebih dari 200 ribu penduduk Indonesia. Lebih lanjut, jika ketegangan antara Tiongkok dan Filipina pecah menjadi perang, terdapat potensi pergerakan kapal selam AUKUS di Australia yang bisa melalui ALKI untuk menuju ke utara. Lagi-lagi, perlu dipertanyakan apakah Indonesia memiliki strategi dan kemampuan untuk menghadapi skenario krisis tersebut. Terlebih lagi, anggaran pertahanan idealnya dialokasikan sekitar 1,5% dari PDB. Namun, realisasi anggaran tersebut perlu disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi Indonesia. Selain itu, tidak bisa dipisahkan bagaimana prioritas pemimpin dalam mengalokasikan anggaran pemerintahannya, seperti bagaimana di era Jokowi diprioritaskan untuk isu ekonomi.

Pertanyaan: Pesan apa yang mau disampaikan oleh LAB 45 terhadap kebijakan-kebijakan di era Jokowi?

Jawaban: Dalam konteks kebijakan era Jokowi, pentingnya keterbukaan dan efektivitas dalam komunikasi kurang mendapatkan perhatian, terutama mengenai isu-isu strategis yang salah satunya adalah anggaran pertahanan. Komunikasi oleh pemerintah tidak hanya sekadar menjawab pertanyaan publik, tetapi harus mampu mengubah persepsi dan perilaku masyarakat melalui penyampaian yang

jelas dan tepat sasaran. Dengan demikian narasi kebijakan harus konsisten, serta disampaikan oleh juru bicara atau tim komunikasi yang memiliki otoritas resmi agar pesan yang sampai tidak terdistorsi.

Dalam konteks ini, persoalan terkait respons pemerintah terhadap kegaduhan di media sosial dan media massa secara umum juga perlu disorot. Dengan munculnya lebih dari 90 isu yang berkembang di media sosial, respons cepat dari Istana sangat penting, terutama saat isu-isu tersebut meledak di media sosial dan media daring. Kekosongan juru bicara presiden selama empat tahun terakhir menyebabkan tidak jelasnya informasi resmi dari pemerintah, sehingga memperpanjang rumor dan spekulasi yang berpotensi merugikan citra pemerintah. Oleh karena itu, juru bicara presiden harus memiliki kemampuan manajemen krisis yang kuat agar mampu meredam spekulasi dengan cepat dan efektif, serta menjaga alur komunikasi yang lancar di tengah-tengah publik.



Jalan Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, 13890



Selasa, 08 Oktober
2024

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id